

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi dari buku :

AbdulWahab,Solichin.2015.*Analisis Kebijakan Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi kebijakan publik* ,Jakarta: Bumi Aksara.

Juanda.2008.*Hukum Pemerintahan Daerah: pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah* .Bandung:ALUMNI.

Kansil C.S.T dan Cristine Kansil.2002, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah* , Jakarta : Sinar Grafika,2002.

Latief Aminudin,2014. *Panduan Bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peran penting Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD*, Jakarta :ASDEKSI

Marwan dan Jimmy P,2009, *Kamus Hukum*, Surabaya :Reality Publisher

Siregar D.Doli, 2016, *Otonomi Dan Pengelolaan Aset Daerah*, Jakarta : Sinergi Manajemen Aset (SIMA).

Soekanto Soerjono .2001.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Yusuf.M ,2011, *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta : Salemba empat .

Zainudin Ali, 2013,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta :Sinar Grafika..

Zainal Abidin Said,2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta :Salemba Humanika.

### Perundang –Undangan :

Undang –Undang Negara Republik Indonesia Tahun1945 (UUDNRI 1945)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Alinea Pertama.

Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Internet :**

[www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-keuangan-daerah.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-keuangan-daerah.html), diakses pada tanggal 8 Juli 2017.